

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Diskriminasi

Menurut Uli Parulian Sihombing dalam Memahami Diskriminasi (2009) diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. Pembedaan perlakuan tersebut bisa disebabkan warna kulit, golongan atau suku, dan bisa pula karena perbedaan jenis kelamin, ekonomi, agama, dan sebagainya.

Menurut Theodorson&Theodorson diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Istilah tersebut biasanya untuk melukiskan, suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah. Sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku mereka itu bersifat tidak bermoral dan tidak demokratis (Sihombing, 2009:3).

Menurut Doob dalam skripsi Unsriana (2011:11) lebih jauh mengakui bahwa diskriminasi merupakan perilaku yang ditujukan untuk mencegah suatu kelompok atau membatasi kelompok lain yang berusaha memiliki atau mendapatkan sumber daya. Secara teoritis diskriminasi dapat dilakukan melalui kebijakan untuk mengurangi, memusnahkan, menaklukkan, memindahkan, melindungi secara legal, dan mengasimilasi kelompok lain.

2.1.1 Jenis-Jenis Diskriminasi

Uli Parulian Sihombing dalam memahami diskriminasi (2009) memaparkan jenis-jenis diskriminasi yang sering terjadi, yaitu sebagai berikut :

- a. Diskriminasi berdasarkan suku/etnis, ras, dan agama/keyakinan.
- b. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender (peran sosial karena jenis kelamin).
- c. Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.
- d. Diskriminasi pada penderita HIV/AIDS.
- e. Diskriminasi karena kasta sosial.

2.1.2 Tipe-Tipe Diskriminasi

Menurut Pettigrew dalam skripsi Unsriana (2011:13) mengemukakan ada dua tipe diskriminasi, yaitu :

- a. Diskriminasi Langsung

Tindakan membatasi suatu wilayah tertentu, seperti pemukiman, jenis pekerjaan, fasilitas umum, dan sebagainya dan juga terjadi manakala pengambil keputusan diarahkan oleh prasangka-prasangka terhadap kelompok tertentu.

- b. Diskriminasi Tidak Langsung

Diskriminasi tidak langsung dilaksanakan melalui penciptaan kebijakan-kebijakan yang menghalangi ras/etnik tertentu untuk berhubungan secara bebas dengan kelompok ras/etnik lainnya, yang mana aturan/prosedur yang mereka jalani mengandung bias diskriminasi yang

tidak tampak dan mengakibatkan kerugian sistematis bagi komunitas atau kelompok masyarakat tertentu.

2.1.3 Sebab-Sebab Diskriminasi

Menurut Yahya dalam skripsi Unsriana (2011:14) mengemukakan sebab-sebab diskriminasi, yaitu :

- a. Mekanisme pertahanan psikologi (*Projection*)
Seseorang memindahkan kepada orang lain, ciri-ciri yang tidak disukai tentang dirinya kepada orang lain.
- b. Kekecewaan
Setengah orang yang kecewa akan meletakkan kekecewaan mereka kepada 'kambing hitam'.
- c. Mengalami rasa tidak selamat dan rendah diri
Mereka yang merasa terancam dan rendah diri untuk menenangkan diri, maka mereka mencoba dengan merendahkan orang atau kumpulan lain.
- d. Sejarah
Ditimbulkan karena adanya sejarah pada masa lalu.
- e. Persaingan dan eksploitasi
Masyarakat kini adalah lebih matrealistik dan hidup dalam persaingan. Individu atau kumpulan bersaing diantara mereka untuk mendapatkan kekayaan, kemewahan, dan kekuasaan.

f. Corak sosialisasi

Diskriminasi juga adalah fenomena yang dipelajari dan diturunkan dari satu generasi kepada generasi yang lain melalui proses sosialisasi. Seterusnya terbentuk suatu pandangan stereotip tentang peranan sebuah bangsa dengan yang lain dalam masyarakat, yaitu berkenaan dengan kelakuan, cara kehidupan dan lain sebagainya.

2.2 Politik Identitas

Identitas, di satu pihak, dapat dipakai untuk mencirikan ide seperti keunikan dan individualitas berdasarkan kesadaran seseorang akan perlambangan dirinya dan dapat mengakibatkan konsep identitas diri. Di lain pihak, hal itu dapat mengacu pada kualitas kesamaan dengan memungkinkan orang mengasosiasikan dirinya sendiri atau diasosiasikan oleh orang lain dengan satu grup tertentu berdasarkan ciri-ciri khusus. Hal itu meliputi ciri-ciri evaluatif atau emosional dari tempat seseorang memperoleh harga diri atau rasa dikenal atau memiliki. Ciri-ciri itu amat bervariasi intensitas dan kepentingannya, seperti juga setiap harapan normatif bertalian yang mungkin melengkapi seseorang dengan pedoman perilaku sosialnya (Laode, 2013:39-40).

Oleh karena itu, identitas etnis yang didasari oleh budaya dan tidak dapat dipisahkan dengan budaya dengan segala unsurnya menjadi identitas dasar yang primordial dan menjadi ciri atau indikator utama bagi seseorang atau suatu kelompok untuk disebut oleh orang dari kelompok lain dan menyatakan dirinya sebagai anggota kelompok etnis tertentu, seperti kelompok etnis Dayak, etnis

Melayu, etnis Madura, etnis Cina Indonesia, etnis Jawa, etnis Bugis, etnis Sunda, etnis Batak, dan etnis yang lain (Laode, 2013:40-41).

Secara teoretis, politik identitas merupakan sesuatu yang bersifat hidup atau ada dalam setiap etnis, di mana keberadaannya bersifat laten dan potensial, dan sewaktu-waktu dapat muncul ke permukaan sebagai kekuatan politik yang dominan. Secara empiris, politik identitas merupakan aktualisasi partisipasi politik yang terkonstruksi dari akar budaya masyarakat setempat, dan mengalami proses internalisasi secara terus-menerus di dalam kebudayaan masyarakatnya dalam suatu jalinan interaksi sosial (Buchari, 2014:19).

Buchari kemudian mengutip Kristianus, yang mengatakan bahwa:

“Politik identitas berkaitan dengan perebutan kekuasaan politik berdasarkan identitas etnis maupun agama. Perjuangan politik identitas pada dasarnya ialah perjuangan kelompok atau orang-orang pinggiran (periferi), baik secara politik, sosial, maupun budaya dan ekonomi.” (Kristianus, 2009:255)

Menurut Sofyan Sjaf dalam Politik Etnik (Dinamika Politik Lokal di Kendari) mendefinisikan politik identitas merupakan tindakan politis yang mengedepankan kepentingan kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan etnik, gender, keagamaan dan sejenisnya.

Politik identitas merupakan suatu alat perjuangan politik suatu etnis untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dimana kemunculannya lebih banyak disebabkan oleh adanya faktor-faktor tertentu yang dipandang oleh suatu etnis sebagai adanya suatu tekanan berupa ketidakadilan politik yang dirasakan oleh mereka. Berdasarkan perasaan senasib tersebut, maka mereka bangkit menunjukkan identitas atau jati diri etnisnya dalam suatu perjuangan politik untuk merebut

kekuasaan dengan memanipulasi kesamaan identitas atau karakteristik keetnisan tertentu yang tumbuh di alam kehidupan sosial budayanya (Buchari, 2014:20).

2.3 Etnis Tionghoa di Indonesia

Menurut M.D. Laode dalam Etnis Cina Indonesia Dalam Politik (2013) mendefinisikan bahwa etnis adalah sesuatu yang terikat pada segolongan rakyat atau suku atau suatu bangsa yang dianggap masih ada hubungan biologisnya. Etnis juga digunakan untuk menandai suatu golongan atau suku atau bangsa yang merupakan bagian keseluruhan umat manusia di dunia.

Indonesia merupakan negara dengan keadaan masyarakat yang terdiri dari berbagai etnis dan suku bangsa. Salah satu etnis yang mempunyai sejarah panjang dan kelim di Indonesia adalah etnis Tionghoa.

Etnis Tionghoa masuk ke Indonesia setelah terjadinya migrasi pada abad-abad kerajaan. Etnis Cina telah memasuki wilayah Indonesia sejak jaman kerajaan-kerajaan Nusantara berdiri. Beberapa ahli mengelompokkan kedatangan bangsa Cina ke wilayah Nusantara dalam beberapa katagori, migrasi bangsa Cina ke wilayah Nusantara terbagi dalam tiga tahap, yaitu :

1. Pertama pada masa kerajaan,
2. Kedua pada masa kedatangan bangsa Eropa
3. Ketiga pada masa penjajahan Belanda.

Tahap pertama, pada masa ini Nusantara masih di perintah oleh raja-raja, jumlah orang Cina yang datang masih sedikit dan belum membentuk satuan komunitas yang mapan. Mereka datang sesuai dengan musim angin yang merupakan sasaran pelayaran utama. Mereka bermukim sekitar pelabuhan dan

dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Meskipun berlangsung selama berabad abad, tahap ini berlangsung lambat, dan tidak menunjukkan eksistensi yang berarti. Tahap ini dikenal dengan *Chinese follow the trade* atau kedatangan bangsa Cina untuk berdagang.

Tahap kedua terjadi setelah kedatangan bangsa Eropa datang di wilayah Asia Tenggara pada abad XVI. Kehadiran orang-orang Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda membuat wilayah Asia Tenggara semakin ramai. Mereka mulai menjadikan beberapa di kawasan itu sebagai pusat kegiatan ekonomi. Situasi tersebut mendorong migrasi bangsa Cina yang semakin meningkat menjadi peluang bagi orang Cina untuk berpartisipasi aktif dalam berdagang. Selain itu, memungkinkan mereka untuk tinggal di wilayah Nusantara dalam waktu yang lama (Dalam Jurnal Kuswandi, 2016: 136-137).

Tahap ketiga, ketika kekuasaan Nusantara berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda, telah banyak ditemukan pemukiman Cina di beberapa daerah seperti Kalimantan Barat, Pantai Timur Sumatra dan sepanjang Pesisir Utara Jawa. Tahap itu menandakan bangsa Cina dalam jumlah yang besar, mereka tidak hanya didorong oleh kepentingan dagang tetapi juga kebutuhan ekonomi untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja bagi proyek pertambangan dan perkebunan (Dalam Jurnal Kuswandi, 2016: 137).

Kedatangan etnis Cina ini sebagian besar dikarenakan hubungan ekonomi yaitu perdagangan. Jalur perdagangan Nusantara telah menjadikan pertemuan antara etnis Cina dengan masyarakat Indonesia yang menghasilkan hubungan perdagangan bahkan sampai kepada hubungan sosial, politik dan budaya. Tetapi,

perdagangan memainkan peranan terpenting dalam masuknya etnis Cina ke wilayah kepulauan Nusantara. Melalui perdagangan ini pula etnis Cina mulai menetap di kota-kota yang mereka singgahi dan terkadang kontak sosial yang dilakukan dengan penduduk lokal menjadi perkawinan sehingga etnis Cina menetap secara permanen di kota-kota tersebut (Dalam Jurnal Kuswandi, 2013: 137).

Orang Tionghoa perantau banyak berasal dari Tiongkok bagian Selatan, Provinsi Fujian (Hokkian), dan Guangdong. Ada juga imigran dari Provinsi Hubei, Zhejiang, dan seterusnya, tetapi dalam jumlah yang lebih sedikit. Pedagang dari Fujian berasal dari banyak kota dan desa, seperti Fu-Zhou, Xia-Men dan Fu-Ching. Dari Provinsi Guangdong kebanyakan dari Kota Guang-Zhou, Mei-Xian (orang Hakka atau Kheh), dan pulau Hainan. Provinsi-provinsi ini luasnya kira-kira sebesar Perancis, Jerman, Spanyol, Italia, dan Inggris. Kota-kota dalam satu provinsi, bahkan juga desa, punya dialek masing-masing. Orang Tionghoa di Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura dan Indonesia, umumnya adalah orang Hokkian. Terbanyak kedua orang Hakka, karena besarnya satu provinsi. Mereka punya kultur, norma, dan kebiasaan hidup yang tidak sama, bahkan pandangan politiknya pun berlainan (Dalam Jurnal Kuswandi, 2013: 137).

Dari Guangdong yaitu orang Hakka berdagang ramuan obat tradisional, makanan kemasan, dan membuka pabrik sabun. Orang Guangzhou (Kong-Fu) ahli membuat mebel dan restoran, sama dengan orang Hainan. Orang Hu-Bei kebanyakan membuka toko buku atau jadi pengusaha binatu. Bahasa yang digunakan yaitu Xiamen, selama itu digunakan oleh marga Yap, Tan, Go, The,

Liem, Oei, dan Tjoa. Dialek ini juga dipakai pada Kong Koan, yaitu sebuah institusi yang mengurus pendatang Tionghoa. Kemungkinan bahasa tersebut digunakan mengingat orang Minan merupakan yang pertama kali datang ke Indonesia. Jumlah orang Minan paling banyak, bahkan pihak Belanda ketika itu memanfaatkannya, mereka dijadikan Mayor, Kapten, Letnan dan Lotia (pengajar). (Dalam Jurnal Kuswandi, 2013: 138).

Dulu, etnis Tionghoa digolongkan sebagai warga negara kelas dua atau disebut Timur Asing, dan Pribumi (Warga negara asli Indonesia) sebagai warga negara kelas tiga. Maka etnis Tionghoa selalu dianggap sebagai orang asing atau non pribumi, dan hal ini berakibat terhadap berbagai peraturan kependudukan yang diatur secara terpisah antara golongan Timur Asing dan golongan Indonesia Asli (Sihombing, 2009:10).

Tiongkok pada masa Dr. Sun Yat Sen (1910) mendeklarasikan bahwa seluruh etnis Tionghoa adalah warga negara Tiongkok. Maka dengan sendirinya seluruh orang Tionghoa di Indonesia memiliki dwikewarganegaraan. Upaya untuk mengatasi masalah dwi kewarganegaraan ini, dilakukan pada tahun 1958 melalui perjanjian antara Indonesia dan RRC (UU No.62/1958). Dalam MOU disepakati bahwa etnis Tionghoa dapat memilih salah satu kewarganegaraan. Bagi yang lahir di RRC tapi sudah bermukim di Indonesia, bisa menjadi warga negara Indonesia. Bagi orang Tionghoa yang sudah lahir di Indonesia, langsung ditetapkan sebagai warga negara Indonesia.

Ketika pemerintahan Sukarno, pemerintah pada waktu itu mentolerir adanya organisasi sosio-politik etnis Tionghoa yaitu BAPERKI (Badan Permusjawaratan

Kewarganegaraan Indonesia) Baperki yang didirikan tahun 1954, berusaha untuk mendapatkan persamaan antara sesama warga negara Indonesia, tanpa pandang latar belakang rasnya. Baperki berpendapat bahwa orang Tionghoa merupakan satu bagian dari suku bangsa Indonesia seperti Jawa, Sunda, dan Minang. Namun akhirnya Baperki dibubarkan karena organisasi tersebut makin condong ke arah kiri (Suryadinata, 2002:81).

Adapun masalah Etnis Tionghoa yang dikaitkan dengan komunis, dan terlibat dalam peristiwa G.30.S hal ini terjadi selama masa peralihan kewarganegaraan etnis Tionghoa di Indonesia pasca perjanjian Indonesia-RRC. Puncak tragedi politik terjadi saat terjadi pembunuhan terhadap 7 jenderal pada 30 September 1965. Akibatnya, etnis Tionghoa menjadi sasaran stigma sebagai kelompok pendukung komunis (PKI) dan terlibat dalam peristiwa G.30.S (Sihombing, 2009:11).

Di kalangan orang pribumi, berkembang cap buruk bahwa etnis Tionghoa adalah penguasa dalam bidang ekonomi. Etnis Tionghoa dianggap memiliki tingkat ekonomi lebih tinggi dan terpisah dari pribumi. Ini menimbulkan kecemburuan bagi para pengusaha pribumi (Sihombing, 2009:11).

Karena kecemburuan itu, para pengusaha pribumi mengusulkan pembatasan terhadap kegiatan etnis Tionghoa. Pada 1952 pemerintah mengeluarkan kebijakan membatasi orang Tionghoa hanya boleh berdagang hingga tingkat kecamatan saja. Pembatasan serupa ditetapkan untuk kepemilikan tanah. Sebagai warga masyarakat, etnis Tionghoa dikenal dan dipahami sebagai orang yang hidup bergerombol di dalam kelompok dan daerah tersendiri. Mereka tidak tinggal

bersama dengan masyarakat pribumi kebanyakan. Mereka biasanya dikenal tinggal di kawasan elit bersama dengan etnis-etnis Tionghoa lain. Sementara, kalau mereka tinggal di masyarakat, mereka dikenal sebagai orang yang tidak pernah keluar dan tidak aktif bergaul dalam kegiatan masyarakat (Sihombing, 2003:12).

Namun saat ini etnis Tionghoa mencoba melupakan kebiasaan tersebut. Sebagian dari mereka mencoba hidup berbaur dengan masyarakat pribumi lainnya meskipun hal itu dirasa tidak mudah untuk dilakukan, menurut Choirul Mahfud dalam manifesto politik Tionghoa di Indonesia (2012) masih ada beberapa kendala yang akan membuat proses membaurnya masyarakat Tionghoa ke dalam arus besar masyarakat Indonesia menjadi kompleks. Salah satu kendala nya yaitu masih menguatnya sentimen kedaerahan dan munculnya politik identitas baik itu didasarkan pada suku, agama, golongan, maupun unsur primordial lainnya.

Di Indonesia terdapat beberapa marga Tionghoa diantaranya ialah :

1. Cia/Tjia
2. Gouw/Goh
3. Kang/Kong
4. Lauw/Lau
5. Lee/Lie
6. Oey/Ng/Oei
7. Ong
8. Tan
9. Tio/Thio/Theo/Teo

10. Lim (Tionghoa Info, 2018).

Dalam etnis Tionghoa ada 5 (lima) peristiwa penting dalam kehidupan seseorang yaitu : saat kelahiran, saat lulus pendidikan tinggi, saat menikah, saat melahirkan (untuk wanita), dan saat meninggal. Untuk menjaga keberlangsungan marga dan garis keturunan, di dalam memilih pasangan hidup orang Tionghoa penuh dengan kehati-hatian selalu mempertimbangkan berbagai macam aspek, diantaranya : Adat istiadat, tata-krama, budaya dan agama Tionghoa. Bagi etnis ini, pernikahan dianggap sebagai tolak ukur keberhasilan dalam hidup (Dalam Artikel Hanifa, 2016).

Kebanyakan dari mereka menikah dengan orang cina lainnya, sebab selain untuk menjaga sistem kekerabatan, keluhuran, dan pelindung keluarga pernikahan yang terjadi biasanya juga bertujuan untuk memperluas bisnis yang mereka punya. Karena pada dasarnya orang cina mendominasi dalam dunia bisnis di segala bidang. Jadi apabila ia menikah dengan rekan bisnis yang bisa diajak bekerja sama maka bisnis mereka akan berkembang pesat. Pada dasarnya etnis Tionghoa menganut sistem kekerabatan patrilineal, maka setelah menikah pihak wanita diwajibkan ikut suami dan mengikuti marga Tionghoa suami karena ahli waris akan diteruskan oleh anak tertua laki-laki dalam keluarga (Dalam Artikel Hanifa, 2016).

Akulturasi budaya antara budaya Tionghoa dan Indonesia pun tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Dari catatan sejarah (dan beragam catatan sejarah lain yang tidak terhitung banyaknya tersebar di seluruh kepulauan nusantara), hubungan nusantara dan Tiongkok memang panjang dan saling mempengaruhi dengan kuat.

Dari sekian banyaknya ragam budaya hasil akulturasi China di nusantara, ada beberapa hal yang sepertinya belum banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia saat ini, diantaranya adalah :

1. Kuntao (Seni Bela diri)

Istilah *kuntao* atau *kuntau* saat ini lebih dikenal merujuk pada ilmu bela diri pencak silat khas Indonesia secara umum. Di kalimantan misalnya, istilah *kuntao* telah menjadi bahasa umum. Masyarakat *Melayu* atau *Dayak* menghubungkan kata *kuntao* dengan beladiri pencak silat pada umumnya. *Kuntao* kemudian hampir tidak bisa dibedakan dengan silat, karena baik pencak silat maupun beladiri asal China tersebut telah melebur dan menjadi satu gaya khas Indonesia (Dalam artikel Niko, 2018).

2. Batik Lasem

Batik kerap dikenal sebagai kain atau pakaian khas dari daerah Jawa. Meski begitu saat ini, telah punya banyak motif dan jenis batik yang berasal dari daerah lain di seluruh Nusantara, baik yang sebelumnya memang dipengaruhi oleh etnis Jawa pada masa kuno, atau memang asli dari daerah tersebut. Batik pun juga mengalami proses akulturasi dengan budaya lain. Salah satunya adalah budaya bangsa Tiongkok. *Batik Lasem Cina* menjadi bukti nyata pembauran budaya Jawa dan Cina di Rembang, khususnya Lasem, Jawa Tengah. Batik Lasem Cina yang sering juga disebut Batik Lasem Oriental ini mensinergikan *sense of art* masyarakat Jawa dan China. Mereka berpadu mengkreasi stailisasi ornamen Cina dan Jawa hingga menjadi motif-motif Batik Lasem Cina nan indah. Batik Lasem Cina tentu saja adalah Batik

Lasem yang ornamen motifnya sangat dipengaruhi budaya Cina. Unsur orientalnya dominatif, meski motifnya selalu berkolaborasi dengan ornamen motif Batik Jawa (Dalam Artikel Niko, 2018).

3. Gambang Kromong

Menurut sejarah Indonesia, akulturasi musik sangatlah kaya. Budaya asli nusantara pun sudah sangat kaya, apalagi ditambahkan budaya Arab, Persia, Portugis, India dan China tentu saja, membuat bangsa ini (sekali lagi) menjadi satu-satunya bangsa dengan jumlah budaya dan kesenian musik yang paling kaya di dunia. Salah satunya adalah Gambang Kromong atau Gambang Keromong. Sebuah gaya orkes musik khas betawi yang merupakan akulturasi sempurna budaya nusantara dan China. Musik gambang kromong memadukan gamelan dengan alat-alat musik Tionghoa seperti *sukong*, *tehyang*, dan *kongahyan*. Nama gambang kromong sendiri memang berasal dari dua alat perkusi yaitu, *gambang* dan *kromong*. Gambang kromong pertama kali dibentuk oleh seorang pemimpin komunitas Tionghoa yang diangkat oleh Belanda (*kapitan Cina*) bernama *Nie Hoe Kong* (masa jabatan 1736-1740).

2.5 Penelitian Terdahulu

Peneliti mengambil referensi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riswandi (2015) yang melakukan penelitian tentang pertentangan elit pengusaha Singaparna dengan pengusaha Tionghoa. Penelitian tersebut terfokus untuk mengetahui pertentangan antara elit pengusaha Singaparna dengan pengusaha Tionghoa yang melarang masuknya pengusaha Tionghoa untuk masuk ke wilayah

Singaparna, Tasikmalaya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian tersebut yaitu adanya pertentangan antara elit pengusaha dengan pengusaha Tionghoa yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor kultural (budaya dan agama), faktor sejarah, dan faktor ekonomi. Beberapa faktor tersebut yang menimbulkan pertentangan dan penolakan oleh elit pengusaha Singaparna terhadap pengusaha etnis Tionghoa di wilayah Singaparna, Tasikmalaya.

Selanjutnya, peneliti mengambil referensi dari Kuntho Wibisono (2017) yang melakukan penelitian tentang kekerasan anti Tionghoa 1998 penelitian tersebut terfokus untuk mengidentifikasi kekerasan anti Tionghoa yang terjadi di solo pada tahun 1998 penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu mengungkapkan kekerasan terhadap etnis Tionghoa pada Mei 1998 menjadi salah satu kekerasan terbesar di Indonesia. Mulai dari peristiwa di Jakarta kekerasan tersebut merambat sampai ke Solo yang merupakan kota dengan jumlah etnis Tionghoa besar, kekerasan ini berawal dari proses usaha penurunan pemerintahan Presiden Soeharto hingga berujung pada pembakaran, penjarahan, dan pembantaian yang ditujukan pada etnis Tionghoa. Keadaan ekonomi masyarakat Indonesia saat itu juga berperan pada terciptanya kekerasan ini.

Lalu, peneliti juga mengambil referensi dari Dian Arisetia (2015) yang melakukan penelitian tentang Persepsi Etnis Tionghoa Sebagai Kelompok Minoritas Terhadap Etnis Non-Tionghoa Dalam Politik Multikulturalisme (Studi kasus di Kelurahan Metro). Penelitian tersebut terfokus untuk mengetahui

persepsi etnis Tionghoa sebagai kelompok minoritas terhadap etnis non-Tionghoa dalam konsep politik multikultural di Kelurahan Metro, penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini yaitu didasarkan pada teori Kymlicka tentang studi *minority group*, suatu tinjauan tentang etnis Tionghoa peranakan di Indonesia mengatakan bahwa ada perbedaan budaya antara penduduk asli Indonesia dan keturunan Tionghoa. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa persepsi etnis Tionghoa terhadap etnis non-Tionghoa dipengaruhi oleh adanya stereotip atau anggapan negatif dan perbedaan atau diskriminasi perlakuan terhadap etnis Tionghoa di Kelurahan Metro. Diskriminasi ini membuat etnis Tionghoa kesulitan untuk membaur dengan masyarakat etnis non-Tionghoa sehingga menumbuhkan sikap membatasi diri (mengisolasi diri) etnis Tionghoa yang hanya bergaul di lingkungan kelompoknya saja. Kondisi politik di Indonesia saat ini mulai membuka peluang bagi etnis Tionghoa untuk berpartisipasi aktif dalam berpolitik yang bertujuan untuk mengakomodir kepentingan kelompoknya sebagai kelompok minoritas.

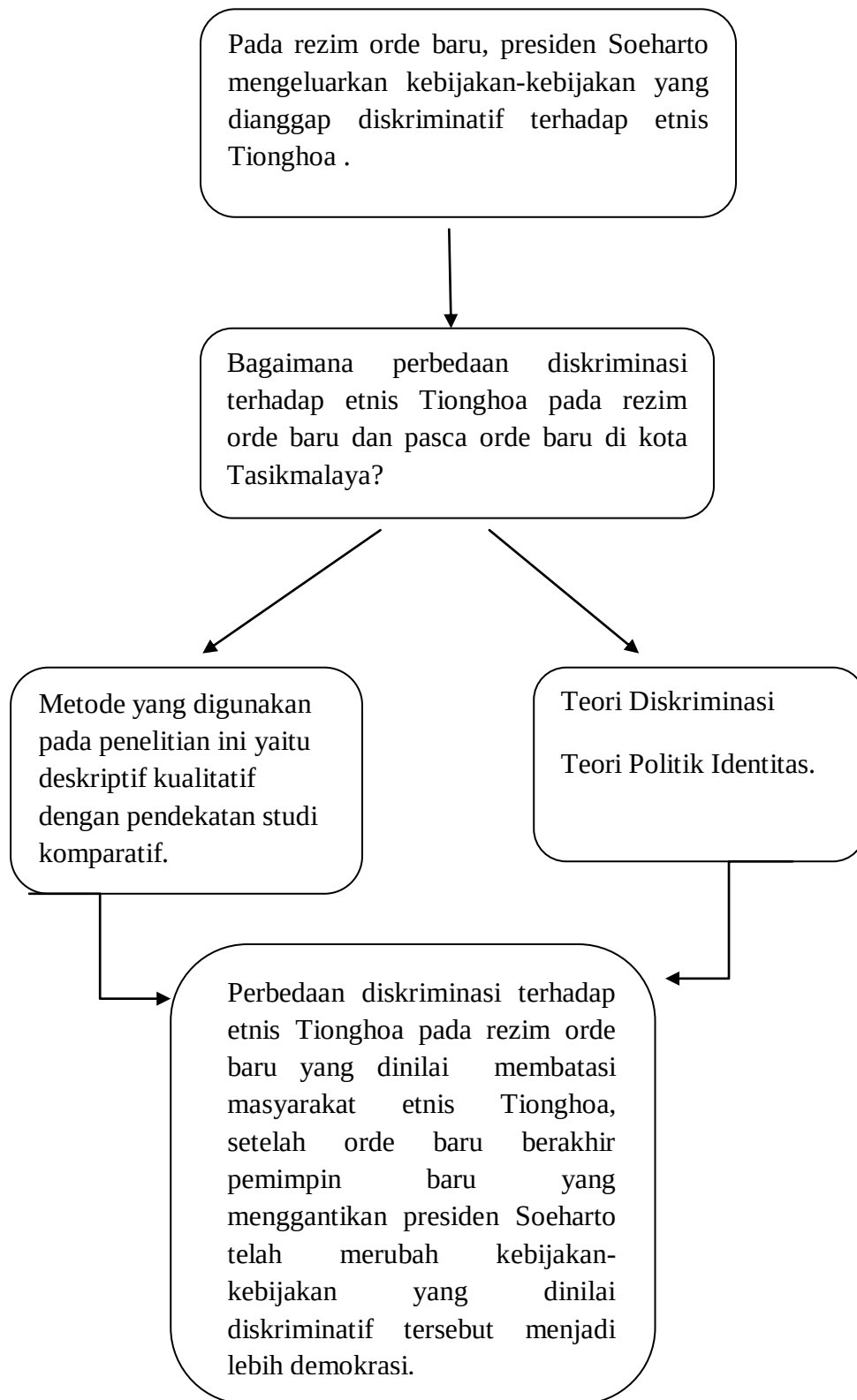
Tabel 2.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Metode
1	Riswandi (2015) Topik : <i>Pertentangan Elit Pengusaha Singaparna dengan Pengusaha Tionghoa.</i>	Hasil dari penelitian tersebut yaitu adanya pertentangan antara elit pengusaha dengan pengusaha Tionghoa yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor kultural (budaya dan agama), faktor sejarah, dan faktor ekonomi. Beberapa faktor tersebut yang menimbulkan pertentangan dan penolakan oleh elit pengusaha Singaparna terhadap pengusaha etnis Tionghoa di wilayah Singaparna, Tasikmalaya.	Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
2	Kuntho Wibisono (2017) Topik : <i>Kekerasan Anti Tionghoa Tahun 1998.</i>	Hasil dari penelitian ini yaitu mengungkapkan kekerasan terhadap etnis Tionghoa pada Mei 1998 menjadi salah satu kekerasan terbesar di Indonesia. Mulai dari peristiwa di Jakarta kekerasan tersebut merambat hingga ke Solo yang merupakan kota dengan jumlah etnis Tionghoa besar. Kekerasan pada Mei 1998 mengundang perhatian hingga ke luar negeri, di mana kekerasan ini berawal dari pembakaran, penjarahan, dan pembantaian yang ditujukan pada etnis Tionghoa.	Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka.
3	Dian Arisetya (2015) Topik: <i>Persepsi Etnis Tionghoa Sebagai Kelompok Minoritas Terhadap Etnis Non-Tionghoa Dalam Politik Multikulturalisme (Studi kasus di Kelurahan Metro).</i>	Hasil dari penelitian ini yaitu tentang etnis Tionghoa peranakan di Indonesia mengatakan bahwa ada perbedaan budaya antara penduduk asli Indonesia dan keturunan Tionghoa. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa persepsi etnis Tionghoa terhadap etnis non-Tionghoa dipengaruhi oleh	Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

		adanya stereotip atau anggapan negatif dan perbedaan atau diskriminasi perlakuan terhadap etnis Tionghoa di Kelurahan Metro. Diskriminasi ini membuat etnis Tionghoa kesulitan untuk membaur dengan masyarakat etnis non-Tionghoa sehingga menumbuhkan sikap membatasi diri (mengisolasi diri) etnis Tionghoa yang hanya bergaul di lingkungan kelompoknya saja. Kondisi politik di Indonesia saat ini mulai membuka peluang bagi etnis Tionghoa untuk berpartisipasi aktif dalam berpolitik yang bertujuan untuk mengakomodir kepentingan kelompoknya sebagai kelompok minoritas.	
4	Risa Fajariani (2018) Topik : <i>Etnis Tionghoa dan Diskriminasi (Studi Komparatif Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa Pada Rezim Orde Baru dan Pasca Orde Baru di Kota Tasikmalaya).</i>	Hasil dari penelitian ini yaitu deskripsi perbedaan tentang diskriminasi terhadap etnis Tionghoa pada rezim orde baru dan pasca orde baru di Kota Tasikmalaya.	Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi komparatif.

2.6 Kerangka Pemikiran



Pada Rezim orde baru, presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dianggap diskriminatif terhadap etnis Tionghoa. Khususnya di kota Tasikmalaya kebijakan tersebut turut dirasakan oleh masyarakat etnis Tionghoa dimulai dari urusan administratif di pemerintahan hingga urusan keagamaan dan adat istiadat. Namun setelah orde baru berakhir dan digantikan oleh pemimpin baru, kebijakan tersebut telah diubah satu persatu.

Untuk membahas permasalahan tersebut peneliti memakai teori diskriminasi dan politik identitas etnis. Karena penelitian ini bertujuan untuk membandingkan suatu permasalahan, maka peneliti memilih pendekatan studi komparatif mengingat permasalahan yang diteliti ini sudah cukup lama berlalu, dan sudah mengalami perubahan maka akan diteliti perbedaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.